

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI
KELURAHAN GEDUNG MENENG KECAMATAN RAJABASA
(Kota Bandar Lampung)**

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik

Disusun Oleh:

Nurmakia Hepi (2216041111)

Dosen Pengampu:

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka harus menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pendekatan masalah penelitian, seperti teori, konsep, analisis, kesimpulan, kekurangan, dan kelebihan yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Diharapkan peneliti dapat belajar dari penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiat, pengulangan penelitian, dan kesalahan yang sama yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut adalah referensi penelitian sebelumnya yang menjadi landasan untuk penelitian ini:

- a) Penelitian terdahulu pertama berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini dilakukan oleh Muhadhofah Triana Husna dan Mochamad, mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia subur (PUS) di Margoyoso masih rendah. Aspek-aspek partisipasi termasuk informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, dan tindakan. Terdapat variasi dalam partisipasi PUS muda, di mana beberapa memiliki partisipasi rendah sementara yang lain memiliki partisipasi tinggi.

Sementara itu, sebagian besar PUS yang lebih tua memiliki partisipasi yang rendah. PUS yang telah menyelesaikan SMA cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan di bawah sekolah atau berpendidikan non-sekolah. Selain itu, PUS dengan pekerjaan ketenagakerjaan juga memiliki partisipasi lebih tinggi daripada yang memiliki pekerjaan lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana, beberapa strategi yang bisa diterapkan meliputi meningkatkan peran petugas Keluarga Berencana atau pemerintah desa untuk mengundang, mendukung, memotivasi, dan memberikan sosialisasi, serta mendorong partisipasi aktif PUS lanjut usia dalam kegiatan KB. Selain itu, perlu ditingkatkan juga peran PUS yang memiliki latar belakang pendidikan SMA ke atas dan PUS yang bekerja sebagai non-karyawan.

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan mempromosikan, melindungi, dan memberikan bantuan dalam memastikan hak-hak reproduksi. Program ini juga memberikan layanan, pengaturan, serta dukungan untuk membantu keluarga mencapai usia pernikahan yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal anak, mengelola kehamilan, dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

- b) Penelitian terdahulu kedua berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan oleh Ieke Sartika Iriany, Ade Purnawan, dan Anggita Yulian Nugraha, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk mengumpulkan data dari peserta, tempat, dokumentasi, arsip, dan peraturan terkait penelitian. Sumber data dipilih dengan sengaja. Tujuannya adalah menggambarkan partisipasi masyarakat, termasuk minat, keaktifan, dan kontribusi mereka dalam program KB di Kecamatan Bungbulang, Garut.

Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi isu partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Bungbulang. Masalah yang mendasari penelitian ini adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap dampak pertumbuhan penduduk. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program KB tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, termasuk pedoman observasi dan pedoman wawancara, yang dirancang sesuai dengan indikator dan komponen yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian yang diacu (Sugiyono, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Bungbulang pada tahun 2017 belum memenuhi harapan karena faktor-faktor seperti minat, keaktifan, dan kontribusi masyarakat yang masih kurang serta adanya hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor penghambat ini meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB, kurangnya dukungan serta keaktifan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga kurang pemahaman tentang tugas-tugas yang terkait dengan program ini dan tidak mengikuti perkembangan informasi di DPKBPPPA Kecamatan Bungbulang.

2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara umum merujuk pada keikutsertaan individu atau kelompok dalam aktivitas. Verhangen (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) menjelaskan partisipasi sebagai bentuk interaksi dan komunikasi yang terkait dengan pembagian tanggung jawab, kewenangan, dan manfaat. Interaksi ini bergantung pada kesadaran individu terhadap:

- a) Kondisi yang perlu diperbaiki.
- b) Kemampuan manusia atau masyarakat untuk memperbaiki kondisi tersebut.
- c) Kesanggupan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang relevan.
- d) Keyakinan diri bahwa kontribusi mereka bermanfaat.

Partisipasi masyarakat diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ini mengacu pada peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan mereka dalam pemerintahan daerah.

Bryant dan White (Muluk, 2007) telah menjelaskan partisipasi dalam bidang administrasi pembangunan sebagai keterlibatan masyarakat atau penerima manfaat proyek dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Mereka menjelaskan bahwa partisipasi mencakup sikap terbuka terhadap persepsi dan ide, perhatian mendalam terhadap hasil proyek yang memengaruhi kehidupan masyarakat, dan kesadaran akan kontribusi orang lain dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan membantu masyarakat mengembangkan kemandirian untuk kemajuan pembangunan. Selain itu, manfaat yang diterima juga merupakan bagian penting dari proses ini, yang akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Griesgraber dan Gunter (Muluk, 2007) mengartikan partisipasi sebagai mekanisme yang memungkinkan individu yang terpengaruh untuk berpartisipasi dalam semua tahap proyek atau program, mulai dari identifikasi hingga implementasi dan evaluasi. Webster (Arzaq dan Tauran, 2015) menjelaskan partisipasi sebagai tindakan “mengambil bagian,” yaitu

ikut serta dalam kegiatan dengan tujuan memperoleh manfaat. Dengan demikian, konsep partisipasi mencakup aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, dan manfaat yang lebih luas.

Dedi Mulyadi (Igrisia, 2008) menguraikan dua makna partisipasi, yakni partisipasi instrumental dan partisipasi transformasional. Partisipasi dianggap instrumental saat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam proyek pembangunan, sedangkan partisipasi transformasional menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Dalam partisipasi instrumental, inisiatif proyek atau kegiatan sering berasal dari pihak eksternal, dengan masyarakat berpartisipasi melalui kemitraan. Tujuan utama proyek ini adalah kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencapai sasaran proyek secara efisien. Asumsi di balik jenis partisipasi ini adalah bahwa perencana lebih tahu apa yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat hanya melaksanakan dan menikmati hasilnya. Dengan kata lain, proses pengambilan kebijakan berjalan dari atas ke bawah (top down).

Partisipasi transformasi masyarakat melibatkan mereka secara luas dalam seluruh tahap pelaksanaan proyek atau aktivitas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Proyek atau aktivitas ini mencerminkan kehendak masyarakat, dan pengambilan kebijakan terjadi dari bawah ke atas (bottom up). Pentingnya keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan proyek sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, selain meningkatkan kemampuan dan kemandirian, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks partisipasi seperti ini, diasumsikan bahwa masyarakat lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dalam pandangan partisipasi transformasional ini, partisipasi dapat dianggap sebagai cara bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memengaruhi dan berbagi peran dalam hal pembangunan, proses pengambilan kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya. Stakeholders yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum.

Goldsmith dan Blustain (Anwar, 2009) dalam penelitiannya di Jamaica menyimpulkan bahwa masyarakat akan terlibat dalam partisipasi jika:

- a) Partisipasi dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau telah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b) Partisipasi memiliki manfaat langsung bagi masyarakat yang bersangkutan.
- c) Manfaat yang diperoleh dari partisipasi tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.
- d) Masyarakat merasa yakin bahwa mereka dapat mengendalikan proses partisipasi.

Selain itu, partisipasi masyarakat dapat menurun jika mereka tidak aktif atau memiliki peran yang kurang dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Cohen dan Uphoff (Kalesaran dkk, 2015) mengkategorikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang terdiri dari:
 - a) Keputusan Awal (Initial Decisions) . Dimulai dengan identifikasi masalah dan perumusan rencana.
 - b) Keputusan yang sedang Berlangsung (On going Decisions). Melibatkan masyarakat dalam keputusan yang berlanjut.
 - c) Keputusan Operasional (Operational Decisions). Terkait dengan organisasi yang melibatkan masyarakat dalam program.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, yang melibatkan masyarakat dalam tiga cara utama:
 - a) Kontribusi Sumber Daya (Resource Contributions). Berupa tenaga kerja, uang, barang, dan informasi.
 - b) Upaya Administrasi dan koordinasi (Administration and co-ordination efforts) - Melibatkan masyarakat dalam implementasi proyek.
 - c) Program Kepesertaan Kegiatan (Programme Enlistment Activities). Menjadi peserta dalam program pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dengan tiga jenis manfaat:
 - a) Manfaat Materi (Material Benefits). Barang pribadi hasil proyek.
 - b) Manfaat Sosial (Social Benefits). Barang publik seperti sekolah dan klinik.
 - c) Manfaat Pribadi (Personal Benefits). Keuntungan bagi anggota kelompok atau sektor.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, yang terbagi menjadi:
 - a) Partisipasi Langsung. Melibatkan masyarakat atau pemimpin lokal dalam evaluasi.
 - b) Partisipasi tidak Langsung. Partisipasi dalam evaluasi dengan memberikan pendapat untuk perbaikan program.

2.2.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Wilcox dalam Huraerah (2015), terdapat 5 tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a) Memberikan Informasi.
- b) Konsultasi, yang mencakup memberikan pendapat dan umpan balik.
- c) Pengambilan keputusan bersama, di mana masyarakat mendukung ide dan gagasan.
- d) Bertindak bersama, melibatkan diri dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e) Memberikan dukungan untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan sebuah kebijakan atau program. Ini didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk aktif terlibat dalam kebijakan atau program. Selanjutnya, Febriansyah (2015) mengidentifikasi tiga bentuk partisipasi masyarakat:

- a) Minat Masyarakat, yang berpengaruh dalam mencapai tujuan pekerjaan atau jabatan.
- b) Keaktifan Masyarakat, menggambarkan sifat giat, gigih, dinamis, dan berenergi yang cenderung menyebar atau berkembang luas.
- c) Kontribusi Masyarakat, mencakup keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan dengan memberikan bantuan kepada badan atau instansi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan dalam membentuk kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses partisipasi. Menurut Yulianti (2012), faktor-faktor tersebut mencakup:

- a) Pengetahuan dan keterampilan dasar: Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi dan memengaruhi lingkungannya.
- b) Pekerjaan masyarakat: Jenis pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.

- c) Tingkat pendidikan dan tingkat buta huruf: Pendidikan dan tingkat literasi berperan dalam menentukan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai tingkat dan bentuk partisipasi.
- d) Jenis kelamin: Beberapa masyarakat menganggap bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau program tertentu.
- e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu: Heterogenitas budaya, terutama dalam aspek agama dan budaya, dapat memengaruhi pilihan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda.

2.2.5 Cara Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Menggerakkan partisipasi masyarakat bisa diartikan sebagai usaha untuk menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat guna mendukung suksesnya suatu kegiatan atau proyek. Partisipasi bisa berasal dari berbagai motivasi. Menurut Khairuddin (1992: 126), partisipasi masyarakat dapat muncul karena alasan-alasan berikut: terpaksa, ikut-ikutan, dan kesadaran. Partisipasi yang terjadi karena terpaksa seringkali muncul karena ketakutan terhadap otoritas atau tekanan dari atasan, yang mengharuskan masyarakat melaksanakan tugas sesuai perintah. Akibatnya, partisipasi semacam ini cenderung dilakukan dengan keraguan dan kurang antusias, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja yang buruk. Partisipasi semacam ini dapat menimbulkan perasaan terpaksa dan mengakibatkan trauma.

Partisipasi yang muncul karena ikut-ikutan umumnya dipicu oleh rasa solidaritas dengan sesama. Terutama jika inisiatif berasal dari atasan atau pemimpin, orang-orang cenderung mengikuti tanpa sepenuh hati dan tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan kegiatan. Hasilnya seringkali tidak memuaskan karena kurangnya pemahaman. Sementara itu, partisipasi yang muncul karena kesadaran adalah yang paling diharapkan. Partisipasi semacam ini muncul dari dorongan pribadi dan kesadaran hati nurani. Masyarakat yang berpartisipasi atas dasar kesadaran pribadi cenderung lebih berkomitmen dan memahami bahwa pembangunan atau kebijakan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Sebelum seseorang atau masyarakat berpartisipasi, mereka harus menyadari beberapa hal berikut:

- a) Saat ini ada masalah atau keadaan yang perlu diperbaiki.
- b) Keadaan saat ini bisa diubah dan diperbaiki melalui tindakan manusia.
- c) Mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam tindakan perubahan.
- d) Mereka percaya bahwa kontribusi mereka akan memberikan manfaat yang berarti bagi kegiatan tersebut.

Ketika keempat hal ini disadari dan dipahami oleh seseorang, mereka akan merasakan keyakinan yang mendalam bahwa partisipasi mereka sangat penting. Pada tahap awal, masyarakat perlu memahami dengan baik apa yang mereka butuhkan. Masyarakat yang dapat berpartisipasi secara sadar dan aktif akan memiliki keyakinan bahwa situasi yang saat ini dihadapi dapat diubah menjadi lebih baik. Kemandirian masyarakat akan tumbuh dan berkembang jika lingkungan mereka mendukung kesadaran, kemauan, dan kemampuan partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, terwujudnya partisipasi masyarakat merupakan kunci bagi kemandirian mereka sendiri.

Namun, tidak semua individu atau anggota masyarakat bersedia berpartisipasi dengan alasan yang sama. Masyarakat cenderung akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika:

- a) Partisipasi dilakukan melalui organisasi atau kelompok yang sudah dikenal atau ada dalam masyarakat mereka.
- b) Partisipasi memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
- c) Manfaat yang diperoleh dari partisipasi sesuai dengan kepentingan mereka.
- d) Proses partisipasi melibatkan kontrol dari masyarakat itu sendiri.

Untuk menjaga tingkat partisipasi yang tinggi, perlu dilakukan upaya berikut:

- a) Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- b) Memberikan penjelasan yang jelas tentang maksud dan tujuan keputusan dan perencanaan yang dihasilkan.
- c) Menghargai pendapat dan saran dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
- d) Memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai semua aspek kegiatan.
- e) Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran dalam program.

2.3 Tinjauan Program Keluarga Berencana

2.3.1 Konsep Program

Program tidak dapat dipisahkan dari aspek kebijakan. Menurut Iskandar (2012) dalam Ramdhani & Ramdhani (2017), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap yang diambil atau tidak diambil oleh berbagai pihak atau aktor sebagai langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan menjadi faktor kunci bagi organisasi dalam mencapai tujuan mereka.

Pasolong (2008), seperti yang disampaikan dalam Herdiana (2018), menjelaskan bahwa kebijakan adalah rangkaian alternatif yang tersedia untuk dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, Danim (2005) dalam Haerul et al. (2016) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan khusus yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok individu untuk mengatasi masalah tertentu.

Pengertian program, sebagaimana dikemukakan oleh Jones (1984) dalam Cakrawijaya (2013), adalah metode yang disetujui untuk mencapai suatu tujuan. Ini menunjukkan bahwa program-program adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, program pemerintah merujuk pada upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan program-program tersebut biasanya diuraikan dalam dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.3.2 Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Program Keluarga Berencana adalah upaya untuk mencapai keluarga berkualitas dengan mempromosikan, melindungi, dan memberikan bantuan untuk hak-hak reproduksi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyelenggarakan layanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan dalam membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia melahirkan anak, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan pandangan ini, Program Keluarga Berencana bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan layanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan dan menghindari kehamilan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan

kesakitan dan kematian. Program ini juga berupaya memberikan layanan berkualitas yang terjangkau, dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan, serta meningkatkan mutu nasihat, komunikasi, informasi, pendidikan, dan panduan agar masyarakat memahami dengan baik manfaat dan risiko dari Program Keluarga Berencana, untuk menjaga kelangsungan program dengan efektif (Febriansyah, 2015).

2.3.3 Ruang Lingkup dan Sasaran Program Keluarga Berencana (KB)

Ruang lingkup pelaksanaan program Keluarga Berencana meliputi:

- a) Kependudukan.
- b) Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c) Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga).
- d) Kegiatan lintas sektor, termasuk dalam bidang kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan program Keluarga Berencana.

Sasaran Program Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.
- b) Menurunkan angka kelahiran total.
- c) Meningkatkan partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS).
- d) Meningkatkan partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana.
- e) Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien.
- f) Meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.
- g) Meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pembinaan pertumbuhan anak.
- h) Meningkatkan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
- i) Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program Keluarga Berencana.
- b) Memperbaiki pengelolaan Program Keluarga Berencana.
- c) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana.

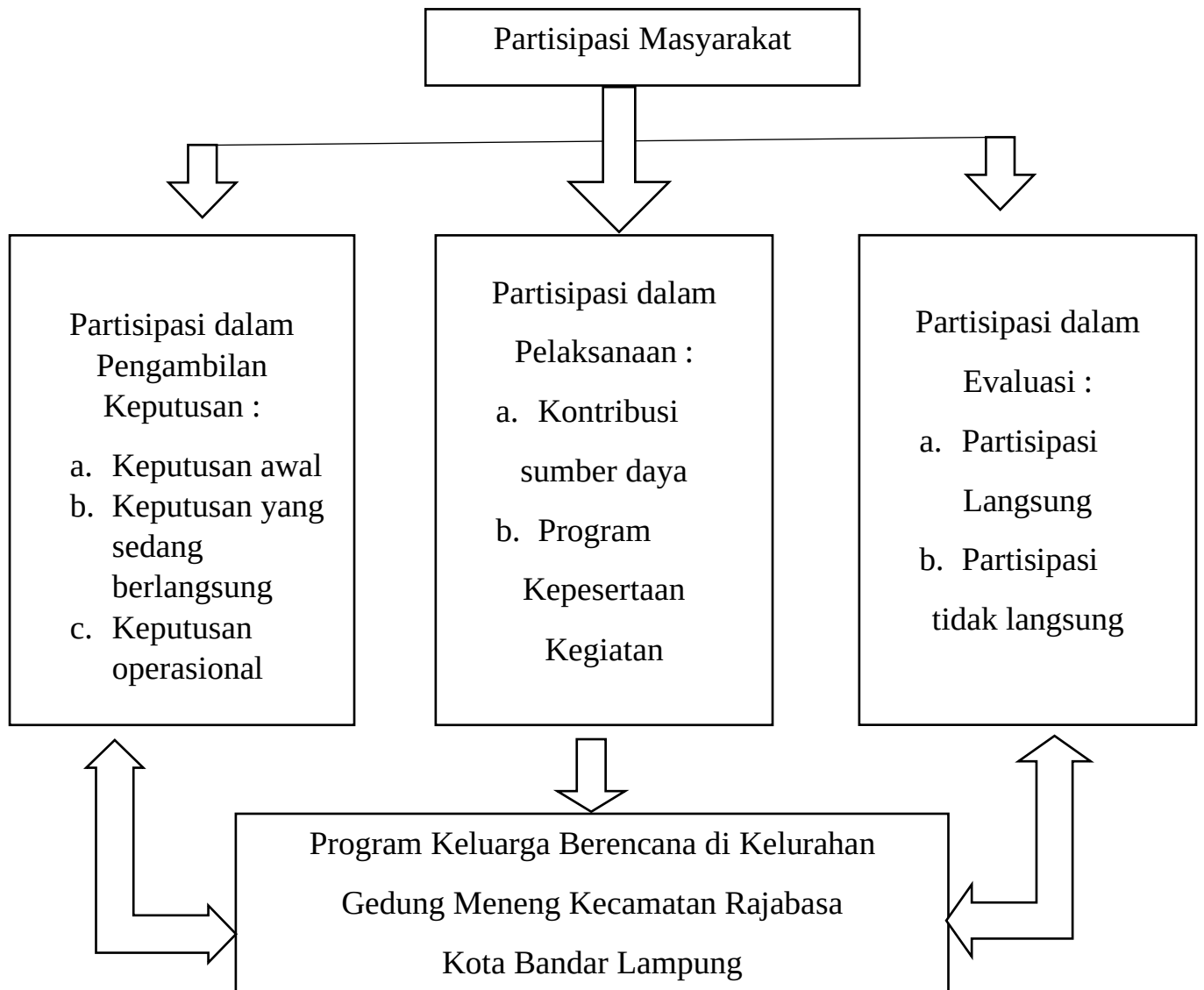
- d) Meningkatkan sumber pembiayaan untuk Program Keluarga Berencana.

2.4 Kerangka Pikir

Program Keluarga Berencana adalah salah satu program pemerintah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan mengatur kelahiran dan melakukan pembangunan lintas sektor yang relevan. Program ini merupakan bagian integral dari berbagai program pembangunan lainnya. Melalui program ini, pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi, mendampingi, dan membina masyarakat, baik melalui lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun sektor swasta, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam kesuksesan Program KB. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan warga guna mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat, seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, dan partisipasi dalam proses evaluasi. Keberhasilan Program KB di Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat, terutama dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat wilayah tersebut.

Bagan Kerangka Pikir



DAFTAR PUSTAKA

- Iriany, I. S., Purnawan, A., & Nugraha, A. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 9-16.
- Puspaningtyas, N. S., Warsono, H., & Marom, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(1), 161-169.
- Husna, M. T., & Mustam, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 249-258.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1).
- Aqmal, R. (2020). Pendidikan Keluarga Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 225-234.
- Prijatni, I., Prijatni, I., & Rahayu, S. (2016). Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Priyanti, S., & Syalfina, A. D. (2017). Buku ajar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. E-Book Penerbit STIKes Majapahit.
- Matahari, R., KM, S., Utami, F. P., KM, S., & Sugiharti, I. S. (2019). *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Pustaka Ilmu.